



KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan secara efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemabangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021;

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021;

KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan kedua tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna

Pada Tanggal : Juli 2020

**KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

YARUSDI, S.Sos
NIP.19620812 198503 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

No. Dokumen	/	/BPBD-BS/2020
Revisi		
Mulaiberlaku		

DOKUMEN RENCANA KERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BENGKULU SELATAN

DiberikanKepada	:	
Unit	:	
TanggalPemberian	:	

Disahkanoleh : KepalaPelaksana BPBD <u>Yarusdi, S.Sos</u> NIP. 19620812 198503 1 012	Diperiksaoleh : Sekretaris <u>Assilawati, SE, M.Si</u> NIP. 19790413 200212 2 005	Disusunoleh : KasubagPerencanaandanPelaporan <u>Robby Novrizal, SE</u> NIP.19811115 200901 1 001
--	---	---

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 yang akan datang. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat rincian mengenai Program, Sasaran dan Capaian sesuai Prioritas yang disusun berdasarkan Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (RENJA) ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan dalam tiga bulan pertama dan merupakan Acuan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021 dan untuk Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Perkiraan Capaian Tahun berjalan.

Sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dimaksud dapat Terwujud dengan Harapan Mampu menjadi Solusi dari setiap Permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Mencapai Target Kinerja yang Sudah direncanakan.

Manna, Agustus 2020

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

YARUSDI, S.Sos
NIP. 19560913 198602 1 003

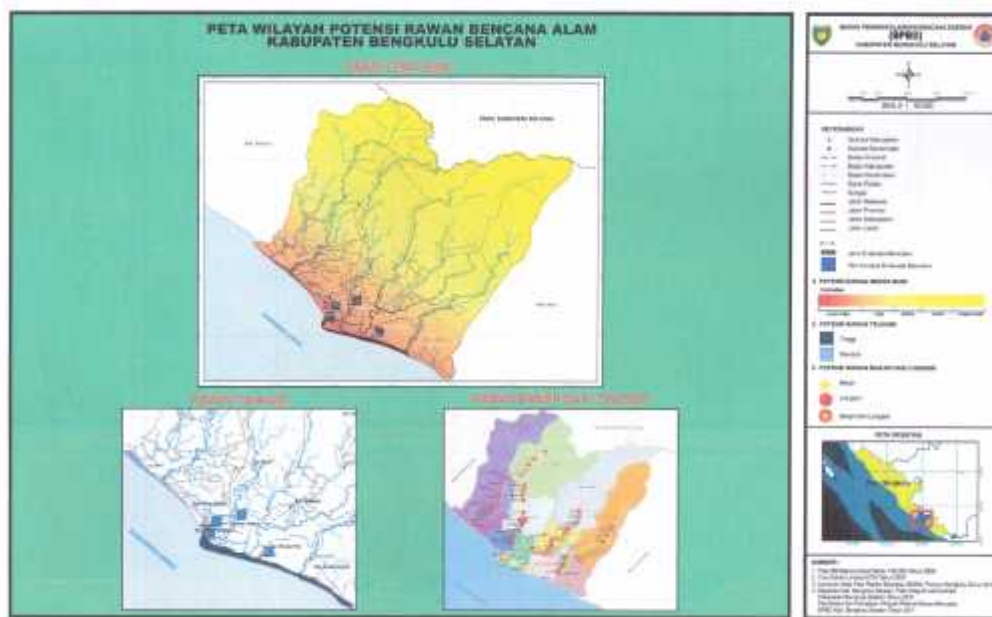
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPd	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	44
3.3. Program dan Kegiatan.....	44
BAB IV PENUTUP.....	46
4.1. Kesimpulan	46
BAB V LAMPIRAN.....	47
- Mapping Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Sesuai dengan PERMENDAGRI N0 90 Tahun 2019	
- Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan	

Bab I

PENDAHULUAN

1.4. LATAR BELAKANG



Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi OPD .

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penetapan dokumen RENJA OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sebagai Dokumen Rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2021.

Program pemerintah untuk menangani masalah Bencana tertuang dalam alinea ke IV, bahwa negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana tersebut diatas, khususnya melindungi bangsa Indonesia dari penghidupan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Tugas Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut untuk tingkat pusat di tangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedangkan untuk Propinsi dan Kabupaten ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Maka dengan perihal diatas maka perlu disusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi

- Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah no 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalisifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2016, Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016, Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017, Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja-BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan Arah dan Pedoman bagi Seluruh Aparatur BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugasnya dan ***Menentukan Prioritas-Prioritas di Bidang Pencegahan, Penanggulangan Bencana, Kedaruratan***

dan Logistik serta Rehabilitasi akibat Bencana, sehingga Tujuan Program dan Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2021 dapat tercapai.

2. Memberikan Informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholders*) tentang Rencana Penanggulangan Bencana.
3. Mempermudah Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2020.
4. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD.

Tujuan penyusunan Renja BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD di dalam Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Mewujudkan Penanggulangan Bencana yang Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien.
3. Mewujudkan Pertanggungjawaban dalam Mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Penanggulangan Bencana.
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanggulangan Bencana Daerah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Mekanisme Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 antara lain Menginventarisasi Daerah Potensi Rencana dengan langsung ke lapangan untuk melihat Kondisi Potensi Bencana baik *Tanah longsor, Banjir, Kebakaran Hutan ataupun Tsunami*.

Untuk mempermudah dalam Penyusunan Dokumen Rencana Kerja, dibagi dalam beberapa Bab dan Sub Bab yaitu sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan

Bab II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPBD

Sebelum disusunnya Pelaksanaan Renja OPD perlu adanya suatu Konsep Skenario Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi yang ada, serta pertimbangan yang lain yaitu terhadap Tujuan-tujuan Kebijakan Makro dan Mikro Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 dijabarkan mengenai Rencana Kegiatan dan Target kerja yang telah menjadi Komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun 2020.

1. Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/ Keluaran yang direncanakan adalah :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan kegiatan :
 - ✚ Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik, target realisasi kinerja 92,79%
 - ✚ Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 98,27%
 - ✚ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 99,85%
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - ✚ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 99,70%
 - ✚ Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 99,54%
 - ✚ Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 99,50%

c. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- ✚ Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, target realisasi kinerja 97,56%
- ✚ Penunjang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, target realisasi 99,92%
- ✚ Pemeliharaan dan penghapusan barang logistik, target realisasi kinerja 99,94%
- ✚ Pendistribusian Logistik Kebencanaan Pada Daerah Bencana

d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- ✚ Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 99,86%
- ✚ Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat/Desa Tangguh dan Pelatihan 94,91%
- ✚ Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana 99,60%

e. Program Penanggulangan Bencana

- ✚ Workshop Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) 98,77%

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan kegiatan :

- ✚ Penyediaan jasa kebersihan kantor
- ✚ Penyediaan ATK
- ✚ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- ✚ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- ✚ Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
- ✚ Penyediaan makanan dan minuman

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dengan kegiatan :

- ✚ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Dengan kegiatan :

- 📁 Penataan dan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang
- 📁 Penyusunan Laporan Keuangan
- 📁 Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran

- d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- 📁 Pemantauan Radio Internet Gempa dan Tsunami

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target Kinerja Hasil / Keluaran yang direncanakan adalah tidak ada.

Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan :

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Skenario Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan diimplikasikan dengan Asumsi Penanganan Sistem Informasi Kebencanaan yang terpusat di BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam hal Kondisi diharapkan dimasa yang akan datang, yaitu :

- 1) Penanganan Bencana bisa tersebar Sampai kepada kelompok Masyarakat terkecil.
- 2) Sistem Informasi yang terkoneksi keseluruh wilayah Rawan Bencana
- 3) Koordinasi lintas Sektoral yang efektif dalam Penanggulangan Bencana
- 4) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bengkulu Selatan adalah Badan yang ditugasi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Mencegah Bencana, Penanganan Darurat, Rehabilitas serta Renkontruksi Pasca Bencana berdsarkan Peraturan Perundang–Undangan. Dalam Mewujudkan Tugas dan Fungsi berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah No. 09 tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Melaksanakan:

1. Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial, yang meliputi:

- a) Menangani Masalah – Masalah Strategis.
- b) Menunjang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
- c) Memelihara dan Menghapus barang Logistik.
- d) Mendistribusikan Logistik Bencana Ke Daerah yang Terdampak Bencana.

2. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, yang Meliputi:

- a) Memantau dan menyebarluaskan informasi potensi bencana alam.
- b) Pemantauan radio Internet Gempa dan Tsunami.
- c) Memfasilitasi Masyarakat atau Desa yang Tangguh Terhadap Bencana Alam.
- d) Pegawai BPBD Lebih Tanggap Dalam Menghadapi Bencana

3. Program Penanggulangan Bencana

a) Tenaga Terampil Dalam Mengkaji dan Menghitung Kebutuhan Kerugian Pasca Bencana.

Namun, Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan, berupa **:Pemantauan Radar Internet Gempa dan Tsunami**, belum dapat direalisasikan dengan baik hal ini dikarenakan oleh:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai
2. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

No	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
				(THN n-2)	(THN n-1)	(THN n)	(THN n+1)	(THN n-2)	(THN n-1)	(THN n)	(THN n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial											
	Persentase Jumlah Bencana Alam Yang Tertanggulangi			70%	80%	85%	85%	99,72%	97,56%	85%	85%	
	Persentase Jumlah Pelayanan Rekonstruksi Pasca Bencana			85%	100%	100%	100%	100%	99,92%	100%	85%	

No	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
				(THN n-2)	(THN n-1)	(THN n)	(THN n+1)	(THN n-2)	(THN n-1)	(THN n)	(THN n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Persentase Jumlah Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Logistik			100%	100%	100%	100%	99,92%	99,94%	100%	100%	
	Jumlah Pendistribusian Logistik Kebencanaan Pada Daerah Bencana			11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	0	9 kec	11 Kec	11 Kec	
II.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial											
	Jumlah Dokumen Pemantauan Radar Internet Gempa Dan Tsunami			100%	100%	100%	100%	89,53%	100%	100%	100%	
	Persentase Jumlah Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam			100%	100%	100%	100%	97,84%	99,86%	100%	100%	

No	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2018 (THN n-2)	TAHUN 2019 (THN n-1)	TAHUN 2020 (THN n)	TAHUN 2021 (THN n+1)	TAHUN 2018 (THN n-2)	TAHUN 2019 (THN n-1)	TAHUN 2020 (THN n)	TAHUN 2021 (THN n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Persentase Jumlah Fasilitas Ketangguhan Masyarakat/Desa Tangguh Bencana Alam dan Pelatihan			100%	100%	100%	100%	0	94, 91%	100%	100%	
	Jumlah Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana			2 Kec	2 Kec	2 Kec	2 Kec	0	2 Kec	2 Kec	2 Kec	
III	Program Penanggulangan Bencana											
	Tersedianya Tenaga Terampil untuk Menghitung dan Mengkaji Kebutuhan Pasca Bencana			35 Org	35 Org	35 Org	35 Org	0	50 Org	35 Org	35 Org	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan adalah *Badan Pemerintah Daerah yang Melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Perangkat Daerah*, bahwa Kedudukan BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Bagian dari Perangkat Daerah untuk Melaksanakan tugas tertentu dalam hal Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan, Berkedudukan dan Bertanggung - jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam Rangka Mewujudkan Tanggung Jawab terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu Meliputi :*A. Penjaminan Pemenuhan Hak Masyarakat dan Pungsi yang terkena Bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum. B. Perlindungan Masyarakat dari Dampak Bencana.C.Pengurangan Resiko Bencana dan Pemanduan Pengurangan Resiko Bencana dengan Program Pembangunan. D. Pengalokasian Dana Penanggulangan Bencana dalam APBD yang Memadai.*

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPBD serta dikaitkan dengan Kondisi Obyektif di Lapangan yang berkenaan dengan Konteks Pencegahan, Penanggulangan Kedaruratan dan Penanganan Pasca Bencana, dapat Di Identifikasi Permasalahan- Permasalahan Sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Aspek Kajian	Capaian/Kodisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal (Kewenangan BPBD)	Eksternal (Diluar Kewenangan BPBD)	
1. Peraturan Perundangan	Baru tersedianya Perda dan Perbup tentang pembentukan kelembagaan BPBD dan tupoksinya		Lembaga baru terbentuk tahun 2010		Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPBD
2. Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan rencana kerja BPBD belum optimal		Masih dalam proses adaptasi dengan tupoksi baru	Kuota perekrutan pegawai terbatas	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas aparatur BPBD
3. Sumber Daya Anggaran	Baru terpenuhinya kebutuhan reguler BPBD	Perda APBD	Rancangan kebutuhan anggaran	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPBD
4. Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai	Permendagri No. 07 tahun (standarisasi sarana dan prasarana pemerintahan)	Belum lengkapnya peralatan dan perlengkapan Rescue	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum Optimalnya Pelaksanaan Tupoksi BPBD
5. Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum adanya Rencana Pengurangan Resiko Bencana (PRB)			Perda PRB belum Terbit	Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah rawan bencana

6. Pemetaan daerah rawan bencana	Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasikan keseluruh wilayah kecamatan		Keterbatasan anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana dan respon yang diperlukan
7. Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang menampung aspirasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana		Terbatasnya ketersediaan anggaran	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya peran serta masyarakat yang dikoordinir oleh BPBD dalam penanggulangan bencana
8. Penanggulangan kedaruratan	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial dan belum adanya SOP Penanggulangan bencana		Koordinasi terpadu antar OPD dan Stake holder	Persepsi OPD terhadap Penanggulangan Bencana belum seragam	Penanggulangan bencana belum terpadu dan belum terwujudnya pola standar
9. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh		Standarisasi tingkat kerusakan akibat bencana	Kebijakan penentu anggaran APBD	Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi

Masalah lain yang dihadapi adalah :

- a. Masih Kurangnya Kendaraan Operasional Lapangan Baik Roda 4 (Empat) Maupun Roda 2 (Dua).
- b. Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia yang Berpengalaman dalam Menangani Bencana.
- c. Masih Kurangnya Sarana Penunjang lainnya.
- d. Anggaran yang Sangat Minim.

- e. Belum adanya Standart Pelayanan Minimal.
- f. Masih Rendahnya Pemahaman Instansi terkait dalam Berkoordinasi untuk Mengantisipasi terjadinya Bencana.

Dalam Rangka Pencapaian Pembangunan Provinsi Bengkulu 5 (lima) tahun ke depan dengan Mengacu pada Visi Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepala Daerah Terpilih telah Mempersiapkan Visi dan Misi tentang Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Visi : *Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Sehat dan Bertaqwa Menuju Bengkulu Emas.*

- Misi** :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan Menerapkan Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik
 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
 3. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas & Prioritas yang Berbasis pada Pemerataan Wilayah dan Berwawasan lingkungan
 4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Potensial daerah berbasis pada UMKM dan Pariwisata yang berpijak pada Pemberdayaan Masyarakat
 5. Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan dalam upaya

pengentasan kemiskinan.

6. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan mendorong peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah
7. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, harmonis dan agamis dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal.

Penjelasan Visi dan Misi :

Visi Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 – 2021 tersebut di atas Mengandung Makna bahwa Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan harus menjadi lebih *Elok* ditandai dengan Indikator lingkungan hidup yang Strategis dalam Pembangunan daerah dan Sektor Pariwisata yang mempunyai nilai tambahan di Kabupaten, *Maju* ditandai dengan Indikator terus Meningkatnya Angka Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produktivitas daerah dan Nilai Agama serta Budaya.

Variabel Sejahtera ditandai dengan Indikator terus Meningkatnya Angka Pendapatan Perkapita serta terus Menurunnya Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran melalui Kedaulatan Pangan pada Perkembangan Sektor Pertanian Ramah lingkungan. Dari Visi tersebut diturunkan 7 (tujuh) Misi yang akan Memayungi Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Misi pertama : *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan Menerapkan Reformasi Birokrasi dalam Peningkatan Pelayanan*

Publik.”. Memayungi Semua Kebijakan, Program dan Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih yang bertumpu pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang beretika dalam Mewujudkan Birokrasi yang Baik dan Bersih Sesuai aturan yang ada dan Hati Nurani (bebas KKN) dan Terciptanya Mutu Pelayanan Publik yang Prima. Pemerataan Pembangunan dengan adanya Pemuktahiran Tata Ruang dan Pemetaan wilayah serta Baseline data Sumber Daya Alam yang memberdayakan Pemerintahan dari Pemerintah Desa hingga Kabupaten.

Misi kedua: *“Meningkatkan Kualitas SumberDaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing melalui Peningkatan layanan Pendidikan dan Kesehatan”.*

Memayungi semua Kebijakan, Program dan Pembangunan daerah dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan dan Budaya.Sistem Pendidikan diarahkan pada Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Memadai dan Berbiaya Murah dengan memberikan Kesempatan Seluas- luasnya kepada rakyat untuk Memperoleh Pendidikan Formal maupun Nonformal serta Peningkatan Kualitas dan Pemerataan tenaga Pendidik.Sistem Kesehatan diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Peralatan, Obat-obatan dan Tenaga Medis serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk masyarakat luas. Pembangunan Kesehatan juga adanya Pusat Rehabilitasi Pengguna narkoba dan Rumah Sehat berstandar Nasional.

Misi ketiga: *“Meningkatkan penyediaan infrastruktur berkualitas dan prioritas yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan”.*

Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan infrastruktur

daerah yang merata dan bermanfaat dengan pemanfaatan ruang yang optimal sesuai kajian lingkungan hidup strategis dalam pembangunan daerah. Di samping itu pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air bersih, irigasi pertanian, jalan, jembatan dan pengembangan sumber daya energi potensial alternatif serta penataan kawasan pariwisata.

Misi keempat : *“Mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya potensial daerah berbasis pada UMKM dan pariwisata yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat”*.

Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian dan lingkungan hidup yang berpotensi melalui peningkatan penelitian dan pengembangan pertanian dari perluasan areal pertanian, pembangunan jalan sentra produksi didesa, peningkatan kreativitas dan penguasaan teknologi bagi industri, mengoptimalkan penguatan kapasitas UMKM dan koperasi dengan pengembangan desa mandiri benih, adanya pengamanan hasil produksi pertanian dan pengembangan produk unggulan daerah berbasis pertanian ramah lingkungan.

Misi kelima : *“Mewujudkan kedaulatan pangan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan dalam upaya pengentasan kemiskinan”*. Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan Ekonomi Kerakyatan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas, sarana dan prasarana, mengoptimalkan kapasitas teknologi dan infrastruktur pada pertanian,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kerajinan. Didukung juga mengoptimalkan versifikasi dan keamanan pangan.

Misi keenam : *“Meningkatkan kualitas kehidupan dengan mendorong peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah”*.

Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah dengan adanya kelembagaan pemuda dan perempuan, peningkatan kapasitas keterampilan melalui pendidikan kewirausahaan, peningkatan prestasi olah raga dan pendidikan. Peningkatan peran pemuda dan perempuan juga perlu adanya kelembagaan perlindungan anak dan perempuan serta pembangunan kampung blogger (IT).

Misi ketujuh : *“Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman, adil, harmonis dan agamis dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal”*. Memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat umum, mengembangkan budaya dan kearifan lokal, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang didukung pendidikan kesiapan bencana. Pembangunan hukum 5 (lima) tahun ke depan harus mampu membela dan mengayomi masyarakat terutama masyarakat kelas bawah, menyadarkan rakyat akan hak dan kewajiban bangsa. Selain itu pemerintah harus mampu menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat melalui perlindungan masyarakat secara terintegrasi dan menyeluruh serta mempertebal rasa persatuan dan cinta tanah air Indonesia melalui bela Negara.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Untuk lebih memperkuat Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pencapaian Visi dan Misi secara Efektif dan Efisien, maka Dianalisis Faktor-faktor yang dianggap dapat Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalannya dengan Memperhitungkan Nilai-nilai yang berkembang dalam Organisasi serta Situasi dan Kondisi lingkungannya

1. Tantangan dan Peluang Bagian Sekretariat

Dalam hal pemberian pelayanan baik itu kegiatan-kegiatan maupun program perencanaan dan pelaporan serta kegiatan ketatausahaan dan menghimpun peraturan perundang-undangan selama Tahun Anggaran 2010 kepada semua unsur dan unit di lingkungan maupun di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan masih membutuhkan adanya sumber daya manusia yang memadai.

Hal ini adalah merupakan tantangan dan peluang bagi bagian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan Koordinasi kepada Bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan, serta Dinas lainnya maupun Kabupaten/ Kota untuk segera menyiapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan sesuai aturan.

Untuk lebih memperkuat strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi secara efektif dan efisien, maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Berikut Analisis SWOT untuk 2 (dua) Arus utama Penanggulangan Bencana, yaitu Pelaksanaan Mitigasi Bencana dan Penanggulangan Bencana.

A. Mitigasi Bencana

Internal	Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah ada lembaga teknis penanggulangan Bencana (BPBD) 2. Sinergitas antara tingkatan pemerintah 3. Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai 	<p>(+) Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana 2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana
<p>(-) Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya data dan informasi mengenai potensi daerah bencana 2. Kurangnya kompetensi SDM aparat 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Pencegahan bencana 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan bencana 5. Kurangnya anggaran untuk mengadakan latihan/gladi/simulasi 	<p>(-) Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Curah hujan yang tinggi 2. Kondisi topografi berupa dataran tinggi dan daerah cekungan 3. Banyaknya penebangan liar sehingga menimbulkan longsor 4. Sulitnya aksesibilitas menuju daerah rawan bencana 5. Terjadinya pembangunan di daerah rawan bencana

B. Penanggulangan Bencana

Internal	Eksternal
<p>(+) <i>Kekuatan</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya satuan tugas penanggulangan bencana2. Sinergitas antar sektor terkait	<p>(+) <i>Peluang</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan perundangan-undangan mengenai penanggulangan bencana2. Partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam penanggulangan bencana
<p>(-) <i>Kelemahan</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Sulitnya jangkauan ke lokasi bencana2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang	<p>(-) <i>Ancaman</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Curah hujan yang tinggi2. Kondisi topografi berupa dataran tinggi dan daerah cekungan3. Sulitnya aksesibilitas menuju daerah rawan bencana4. Terjadinya pembangunan di daerah rawan bencana

Melihat faktor-faktor yang diidentifikasi melalui analisis SWOT di atas, maka dapat diterapkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi diantaranya :

1. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming)

2. Kecenderungan terjadinya perluasan lahan kritis yang disebabkan oleh berbagai faktor
3. Perkembangan penduduk yang akan memicu penambahan kebutuhan akan lahan pemukiman dan perumahan
4. Dampak kegiatan industri yang memicu terjadinya pencemaran lingkungan
5. Kondisi topografi wilayah berupa dataran tinggi dan cekungan
6. Masih banyaknya jalur akses ke beberapa lokasi rawan bencana yang tergolong sulit
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang berdiam dan membangun pemukiman di daerah rawan bencana
8. Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor
9. Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu
10. Belum lengkapnya payung hukum dan peraturan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
11. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis/operasional, rescue KIT, gudang logistik, dan alat serta penunjang lainnya.

Meskipun tantangan yang dihadapi tergolong banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan kinerja BPBD, yaitu :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
2. Adanya ketentuan dan peraturan tentang pengolahan lingkungan

3. Terbitnya aturan dan telah berdirinya lembaga penanggulangan bencana
4. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
5. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
6. Kepedulian lintas sektor dan OPD lainnya untuk mengalokasikan dalam Program-program Kebencanaa

Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Kekuatan

- a. Kabupaten Bengkulu Selatan adalah wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki sumber daya alam, yang merupakan modal pembangunan terutama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana.
- c. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang merupakan

implementasi pasal 5, pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Kelemahan

- a. Penanggulangan Bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis, terencana, terpadu dan terkoordinasi secara optimal.
- b. Sumber daya manusia dan aparatur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana baik secara kualitas maupun kuantitas belum cukup memadai.
- c. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai.
- d. Terbatasnya anggaran daerah yang dialokasikan untuk pembiayaan penanggulangan bencana.
- e. Belum optimalnya penyerapan anggaran pusat untuk penanggulangan bencana.
- f. Belum optimalnya operasional lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Peluang

- a. Sumber daya manusia sebagai aset penting daerah merupakan yang dapat dikembangkan untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
- b. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kondisi geografis, geologis, dan hidrologis yang rawan terjadinya bencana. Frekuensi dan intensitas kejadian bencana yang cenderung meningkat seperti bencana gempa bumi, berdampak pada meningkatnya kerugian, sehingga kesiap-siagaan, pencegahan dan mitigasi bencana menjadi prioritas bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah, didukung oleh LSM-LSM dan badan-badan nasional dan internasional.

4. Tantangan

- a. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana.
- b. Adanya isu-isu terjadinya bencana global seperti bahaya pemanasan global, bahaya elnino, dan lain-lain.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPAD

Proses yang dilakukan dalam Membandingkan antara Rancangan Awal RKPAD dengan hasil analisis kebutuhan.

Perbandingan antara rancangan awal RKPAD dengan hasil analisis kebutuhan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam prioritas penanganan bencana meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 486.346.350,-
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp. 313.183.000,-
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp. 46.633.300,-
4. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sebesar Rp. 9.198.926.140,-
5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam sebesar Rp. 1.973.877.230,-

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang ingin dicapai : Tertib Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang ingin dicapai : Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang ingin dicapai : Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang ingin dicapai :
 - a. Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
 - b. Adanya penanganan infrastruktur secara darurat
 - c. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
 - d. Tertatanya manajemen logistik
 - e. Jumlah pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana
 - f. Jumlah anggota tim tanggap darurat yang terlatih.
 - g. Adanya pemeliharaan dan penghapusan barang logistik
5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam yang ingin dicapai :
 - a. Terlaksananya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana
 - b. Terlaksananya pemantauan radar internet, gempa dan tsunami.
 - c. Terbentuknya satgas penanggulangan bencana
6. Program penanggulangan bencana yang ingin dicapai : tersedianya tenaga terampil untuk menghitung dan mengkaji kebutuhan pasca bencana.

PENJELASAN TEMUAN - TEMUAN

Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya BPBD Memiliki ***Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGASPB)*** yang Siaga 24jam Non Stop untuk Menghimpun Data Kejadian Bencana Serta Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana.

Terkait dengan hal tersebut Komitmen Pemerintah harus Serba Tanggap Darurat dan Cepat sehingga dalam Pengambilan Keputusan yang Cepat diperlukan Sumber Daya Manusia yang selalu Siap Mengendalikan Satgas Penanggulangan Bencana BPBD.

Dalam Rancangan RENJA BPBD tahun 2020 lalu tidak Menganggarkan Dana untuk kegiatan : **Penyusunan Dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Bencana.**

Dari kegiatan tersebut diatas diharapkan dapat dihasilkan Lokasi – Lokasi Rawan Bencana Terbaru di Bengkulu Selatan, sehingga aparat pemerintah Kabupaten dan Kecamatan yang berkompeten dalam tanggap darurat dan mengkaji kebutuhan dalam verifikasi pasca bencana.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1.	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Kab. Bengkulu Selatan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	499.000.000	Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Kab. Bengkulu Selatan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	486.346.350	
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur										

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kab. Bengkulu Selatan	Jumlah cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bln	529.800.000	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bengkulu Selatan	Jumlah cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bln	46.633.300	
IV.	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
1.	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase jumlah bencana alam yang tertanggulangi	85%	114.950.000	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase jumlah bencana alam yang tertanggulangi	100%	27.660.830	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Penunjang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase Jumlah Pelayanan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Pasca Bencana	100%	145.200.000	Penunjang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase Jumlah Pelayanan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Pasca Bencana	100%	76.828.310	
3.	Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Logistik	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase jumlah pemeliharaan dan penghapusan barang logistik	100%	55.000.000	Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Logistik	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase jumlah pemeliharaan dan penghapusan barang logistik	100%	14.464.100	
4	Pendistribusian Logistik Kebencanaan Pada Daerah Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Jumlah Pendistribusian Logistik Kebencanaan Pada Daerah	11 Kec	13.200.000	Pendistribusian Logistik Kebencanaan Pada Daerah Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Jumlah Pendistribusian Logistik Kebencanaan Pada Daerah	11 Kec	43.596.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
V	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
1.	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	12 Bln	86.515.000	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	12 Bln	1.917.176.600	
2	Pemantauan Radio Internet Gempa Dan Tsunami	Kab. Bengkulu Selatan	Jumlah dokumen pemantauan radio internet gempa dan tsunami	1 Paket	66.550.000	Pemantauan Radio Internet Gempa Dan Tsunami	Kab. Bengkulu Selatan	Jumlah dokumen pemantauan radio internet gempa dan tsunami	1 Paket	8.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Fasilitas Ketangguhan Masyarakat/Desa Tangguh dan Pelatihan	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase Jumlah Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat/Desa Tangguh Bencana Alam dan Pelatihan	11 Kec	53.240.000	Fasilitas Ketangguhan Masyarakat/Desa Tangguh dan Pelatihan	Kab. Bengkulu Selatan	Persentase Jumlah Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat/Desa Tangguh Bencana Alam dan Pelatihan	11 Kec	25.588.830	
4	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Jumlah Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	36 Org	66.550.000	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Jumlah Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	39 Org	22.571.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari beberapa Program yang diajukan oleh BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Penanggulangan Bencana pada Masyarakat yang terkena dampak Bencana bertujuan untuk Penanganan Bencana yang bersifat *Cepat, Tepat, Terpadu, Terkoordinasi dan Akuntabel baik pada tahap Pra Bencana saat terjadi Bencana maupun Pasca Bencana.*

Dalam hal ini untuk Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, sehingga Perencanaan Pembangunan daerah harus disusun secara Terpadu, Terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Ditinjau dari segi Geografis dan Morfologi, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Untuk itu Pemerintah berusaha untuk melayani Masyarakat dari berbagai Ancaman bencana dengan Program dan Kegiatan yang diusulkan di tahun 2021.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume (Rp)	Catatan
I	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Kab. Bengkulu Selatan	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1.592.443.000	Kegiatan lama
II	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Bengkulu Selatan	Tersedianya Pakaian Pegawai BPBD Bengkulu Selatan	35.000.000	Kegiatan baru
III	Program Pengembangan Data/Informasi				
	1. Penyusunan Dan Analisis Data/Infomasi Perencanaan Pemabangunan Kawasan Rawan Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Tersedianya Peta Daerah Kawasan Rawan Bencana	150.000.000	Kegiatan baru

No	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume (Rp)	Catatan
IV	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	1. Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Kab. Bengkulu Selatan	Kembalinya Keadaan Normal Pada Saat Bencana di Wilayah Bencana dan Tersedianya Data Informasi Bencana serta Terdistribusinya Data Informasi Bencana ke BNPB (Pusdalop)	105.000.000	Kegiatan Lama
V	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				
	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	100.000.000	Kegiatan Baru
	2. Pemantauan Radio Internet Gempa dan Tsunami	Kab. Bengkulu Selatan	Terlaksananya Data Informasi Secara Dini (EWS) dan Tersedianya Informasi Serta Laporan Bencana Di Bengkulu Selatan Ke BNPB	70.000.000	Kegiatan Lama
	3. Penerapan Sekolah/Madrasyah Aman Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Kesiapsiagaan Sekolah/Madrasyah Terhadap Bencana	100.000.000	Kegiatan Baru

No	Program /kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume (Rp)	Catatan
	4. Pembentukan Satgas Penanganan Bencana BPBD	Kab. Bengkulu Selatan	Terbentuknya Satgas atau Tim Reaksi cepat daerah Penanganan Bencana	628.000.000	Kegiatan Baru
VI	Program Penanggulangan Bencana				
	1. Workshop Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	Kab. Bengkulu Selatan	Terciptanya Sdm yang Handal	90.000.000	Kegiatan Baru
	2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Tertanggulangnya Masyarakat yang Tertimpa Bencana Pasca Bencana	30.000.000	Kegiatan Baru
	3. Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Kab. Bengkulu Selatan	Tersedianya Data Penilaian Kerusakan dan Kebutuhan Akibat Bencana	60.000.000	Kegiatan Baru
	4. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Kab. Bengkulu Selatan	Tersedianya Data Perbaikan Rumah Akibat Bencana	73.000.000	Kegiatan Baru

Bab III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Hakekatnya Perencanaan Pembangunan Nasional Merupakan Acuan Utama bagi setiap Daerah Provinsi dan Kabupaten Kotadalam Merumuskan Kebijaksanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. Arah Kebijaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten harus didasari oleh Visi dan Misi Daerah dan Out Put akhirnya berupa Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rencana Program dan Kegiatan didasari kepada *Melindungi Segenap Bangsa dan Memberi Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara*. Disini BPBD berperan serta dalam Proses Melindungi Segenap Bangsa dalam Penanggulangan Bencana, dan Memberikan Kenyamanan pada Warga dari semua Faktor-faktor Penyebab Bencana yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan Kondisi Umum, Tantangan, dan Permasalahan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah diuraikan pada BAB II Menggambarkan bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan belum Aman dari Bencana. Sistem penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum

dan tidak Tertangani secara Optimal, Terencana dengan Kurang Kesiapsiagaan, Tindakan Tanggap dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana-bencana yang terjadi Selama ini. Oleh karena itu, *Arah Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Mempunyai Tujuan untuk Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Kondusif, Aman, Siap-siaga, Tanggap, Tangguh dalam Menghadapi Bencana.*

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

1. Tujuan :

- a. Membangun Sistem Penanggulangan Bencana yang baik untuk Melindungi Masyarakat dari Ancaman Bencana.
- b. Mengurangi Resiko Bencana dan Mengantisipasi Kemungkinan Terjadinya Bencana.
- c. Membangun Upaya Cepat Tanggap dalam Melakukan Penanggulangan Bencana.
- d. Melaksanakan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam Rangka Pemulihan Kehidupan Masyarakat.

2. Sasaran :

- a. Terbitnya Peraturan Daerah bagi Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan dan Adanya Sumber Daya Terpadu dalam Penanggulangan Bencana.
- b. Berkurangnya Resiko Terhadap Ancaman Bencana.
- c. Menghindari Kemungkinan Bertambahnya Korban Bencana.
- d. Pulihnya Kehidupan Masyarakat Pasca Bencana.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Penentuan atau Pengambilan bahan Pertimbangan Pembuatan Program dan Kegiatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Menentukan Faktor-faktor yang menjadi Rumusan Program dan

Kegiatan sesuai dengan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian Standar Pelayanan Minimum, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan Daerah Terisolir.

Bab IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 ini merupakan Penyempurnaan dari Renja tahun 2020 dengan Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 - 2021. Dalam Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan Gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran maupun Tujuan Organisasi. Melalui Rencana kerja (RENJA) ini akan dilihat Indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Berpedoman pada Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dengan Tolak ukur Rencana Kerja (RENJA), maka seluruh Aktivitas harus dapat diukur. *Pengukuran tersebut tidak Semata- mata kepada Input (Masukan), namun lebih ditekankan kepada Out put (Keluaran), Out Come (Hasil), Benefit (Manfaat) dan Impact (Pengaruh/Dampak yang ditimbulkan dari Manfaat Suatu Program dengan Membandingkan Kondisi sebelum dan Sesudah dilakukannya suatu program)* dari Program tersebut bagi masyarakat dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung Jawab. Demikian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkulu Selatan ini disusun sebagai Komitmen Organisasi untuk dapat dicapai pada tahun ini dan Semoga Bermanfaat dalam Rangka Mendukung Kelangsungan Pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

YARUSDI, S.Sos
NIP. 19560913 198602 1 003

BAB V

LAMPIRAN

- MAPPING PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KABUPATEN BENGKULU SELATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
- RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 BPBD KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

MAPPING PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KABUPATEN BENGKULU SELATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022	
URUSAN	BIDANG URUSA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1													
1	05												
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
1	05	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	05	01	2.01	02	Penyusunan program dan Kegiatan Prangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan perangkat daerah dlm dok Perencanaan	BPBD Kab Bkl Selatan	12 Dokumen	60,000,000	DAU		12 bulan	63,000,000
1	05	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Peragkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah dlm dok Perencanaan	BPBD Kab Bkl Selatan	12 Dokumen	60,000,000	DAU		12 bulan	63,000,000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan								
1	05	01	2.02	06	Peyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKP	BPBD Kab Bkl Selatan	7 Dokumen	40,000,000	DAU		12 bulan	42,000,000
1	05	01	2.03		Administrasi Umum								
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran listrik, telpon dan air	BPBD Kab Bkl Selatan	12 Bulan	35,400,000	DAU		12 bulan	37,170,000
1	05	01	2.03	07	Peyediaan Jasa administrasi Keuangan	Pembayaran Honorarium PNS Non PNS	BPBD Kab Bkl Selatan	12 Bulan	120,000,000	DAU		12 bulan	126,000,000
1	05	01	2.03	08	Peyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	BPBD Kab Bkl Selatan	12 Bulan	30,000,000	DAU		12 bulan	31,500,000
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dengan baik	BPBD Kab Bkl Selatan	12 Bulan	85,000,000	DAU		12 bulan	89,250,000
1	05	01	2.03	11	Peyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan Penggandaan	BPBD Kab Bkl Selatan	12 Bulan	30,000,000	DAU		12 bulan	31,500,000
1	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor	BPBD Kab Bkl Selatan	12 Bulan	20,000,000	DAU		12 bulan	21,000,000

1	05	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	BPBD Kab Bkl Selatan	10 Buah	8,091,000	DAU		12 buah	8,495,550
1	05	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPBD Kab Bkl Selatan	1100 eksamplar	35,500,000	DAU		1100 eksamplar	37,275,000
1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman	BPBD Kab Bkl Selatan	600 kotak	45,000,000	DAU		600 kotak	47,250,000
1	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya pengajuan proposal dana hibah, peralatan dan bantuan logistik, dan bantuan logistik, rapat koordinasi di BNPB, BPBD Kota dan Provinsi serta instansi teknis terkait dan cepatnya penanganan bencana di Kabupaten bengkulu selatan.	BPBD Kab Bkl Selatan	206 kali	450,000,000	DAU		206 kali	472,500,000
1	05	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	BPBD Kab Bkl Selatan	1 unit	1,613,943,000	DAU		1 unit	1,694,640,150
1	05	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas BPBD Kabupaten bengkulu selatan.	BPBD Kab Bkl Selatan	15 unit	330,000,000	DAU		15 unit	346,500,000
1	05	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	BPBD Kab Bkl Selatan	3 unit	9,453,000	DAU		3 unit	9,925,650
1	05	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terehabilitasinya rumah gedung kantor	BPBD Kab Bkl Selatan	3 unit	205,328,000	DAU		3 unit	215,594,400
1	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian pegawai BPBD kabupaten bengkulu selatan	BPBD Kab Bkl Selatan	40 orang	40,000,000	DAU		40 orang	42,000,000
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab Bkl Selatan	1 kegiatan	150,000,000	DAU		1 kegiatan	157,500,000
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per jenis bencana)	Terkomunikasinya, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (per jenis bencana)	BPBD Kab Bkl Selatan	3 kegiatan	275,000,000	DAU		3 kegiatan	288,750,000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya rencana penanggulangan bencana Kabupaten / Kota	BPBD Kab Bkl Selatan	12 bulan	150,000,000	DAU		12 bulan	157,500,000

1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Terlatihnya masyarakat dalam mencegah atau menghadapi bencana	BPBD Kab Bkl Selatan	3 kegiatan	175,000,000	DAU		3 kegiatan	183,750,000
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan tersedianya operasi sarana prasarana kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab Bkl Selatan	12 bulan	150,000,000	DAU		12 bulan	157,500,000
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya peralatan dan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	BPBD Kab Bkl Selatan	1 kegiatan	150,000,000	DAU		1 kegiatan	157,500,000
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terkelolanya risiko bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab Bkl Selatan	1 kegiatan	150,000,000	DAU		1 kegiatan	157,500,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tersedianya penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	BPBD Kab Bkl Selatan	1 kegiatan	100,000,000	DAU		1 kegiatan	105,000,000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tertanganinya pasca bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab Bkl Selatan	1 kegiatan	200,000,000	DAU		1 kegiatan	210,000,000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dan terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab Bkl Selatan	1 kegiatan	630,000,000	DAU		1 kegiatan	661,500,000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Teresponnya bencana darurat secara cepat dan tanggap	BPBD Kab Bkl Selatan	1 kegiatan	250,000,000	DAU		1 kegiatan	262,500,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terevakuasinya korban bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab Bkl Selatan	1 kegiatan	160,000,000	DAU		1 kegiatan	168,000,000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dan terevakuasinya logistik penyelamatan dan korban bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab Bkl Selatan	2 kegiatan	150,000,000	DAU		2 kegiatan	157,500,000
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
1	05	03	2.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terjalannya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	BPBD Kab Bkl Selatan	1 kegiatan	150,000,000	DAU		1 kegiatan	157,500,000
					JUMLAH				6,057,715,000				6,360,600,750

Manna, Juni 2020
Kepala Pelaksana
BPBD Kab Bengkulu Selatan

YARUSDI,S.Sos
NIP. 19620812 198503 1 012

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dicetak dari: Sistem SIPDA Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Dicetak tanggal: 12, Juli 2019

Nama OPD : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1.6	Sosial								
1.6.2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1.6.2.1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.704.000.000				5.036.170.500
1.6.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				626.622.500				670.002.500
1.6.2.1.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran telepon, Listrik	BPBD	12 Bulan	19.400.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		12 Bulan	24.400.000
1.6.2.1.1.7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemabayaran Honorarium PNS/Non PNS	BPBD	12 Bulan	86.900.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		12 Bulan	91.900.000
1.6.2.1.1.8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	BPBD	12 Bulan	23.510.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		12 Bulan	28.510.000
1.6.2.1.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terciptanya Administrasi Alat Tulis Kantor yang Baik	BPBD	12 Bulan	58.763.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		12 Bulan	63.763.000
1.6.2.1.1.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	BPBD	12 Bulan	26.900.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		12 Bulan	30.900.000
1.6.2.1.1.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Dokumentasi dan Dekorasi	BPBD	12 Bulan	8.100.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		12 Bulan	13.100.000
1.6.2.1.1.15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	BPBD	1050 Eksemplar	35.500.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		1050 Eksemplar	40.500.000
1.6.2.1.1.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makan dan Minum	BPBD	525 Kotak	33.820.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		525 Kotak	38.200.000
1.6.2.1.1.18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	BPBD	206 Kali	333.729.500	Dana Alokasi Umum (D A U);		206 Kali	338.729.500
1.6.2.1.2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				2.077.868.000				2.197.868.000
1.6.2.1.2.3	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya lokasi parkir BPBD yang memadai	BPBD	2 Unit	150.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		2 Unit	255.000.000
1.6.2.1.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	BPBD	9 Unit	1.432.443.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		9 Unit	1.438.443.000
1.6.2.1.2.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	BPBD	3 Unit	50.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		3 Unit	52.000.000
1.6.2.1.2.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	BPBD	14 Unit	283.173.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		14 Unit	288.173.000
1.6.2.1.2.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terciptanya Gedung Kantor yang Nyaman	BPBD	1 Unit	162.252.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		1 Unit	164.252.000
1.6.2.1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				40.000.000				45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.2.1.3.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Lengkap Lapangan	BPBD	36 Stel	40.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		36 Stel	45.000.000
1.6.2.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				128.654.500				143.745.000
1.6.2.1.6.11	Penataan Dan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang	Pembuatan administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa	BPBD	4 Dokumen	14.909.500	Dana Alokasi Umum (D A U);		4 Dokumen	20.000.000
1.6.2.1.6.12	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Prognosis Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD	3 Dokumen	18.745.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	Keputusan Gubernur Bengkulu No. e.579. BPKD Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2019 dan Rancangan Pelaporan Bupati Bengkulu Selatan tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	3 Dokumen	23.745.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.6.2.1.6.13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran	Lapaoran RKA/DPA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyusunan Rencana Kerja OPD	BPBD	8 Dokumen	95.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);	Keputusan Gubernur Bengkulu No. e.579. BPKD Tahun 2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2019 dan Rancangan Pelaporan Bupati Bengkulu Selatan tentang penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	8 Dokumen	100.000.000
1.6.2.1.16	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				285.930.000				305.630.000
1.6.2.1.16.10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	Tertanganinya Bencana Secara Darurat	BPBD	2 Kegiatan	72.380.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		2 Kegiatan	77.380.000
1.6.2.1.16.12	Penunjang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Tersedianya data lokasi bencana dan alokasi dana BNPB	BPBD	2 Dokumen	75.300.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		2 Dokumen	80.000.000
1.6.2.1.16.13	Pemeliharaan Dan Penghapusan Barang Logistik	Tertanganinya Bencana Secara Darurat	BPBD	2 Kegiatan	38.250.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		2 Kegiatan	43.250.000
1.6.2.1.16.14	Pendistribusian Logistik Kebencanaan Pada Daerah Bencana	Tertanganinya bencana secara darurat	BPBD	11 Kecamatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		11 Kecamatan	105.000.000
1.5.2.1.22	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				1.216.925.000				1.283.925.000
1.5.2.1.22.1	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Terserapnya pengetahuan tentang menghadapi bencana	BPBD	3 Kecamatan	106.875.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		3 Kecamatan	110.875.000
1.5.2.1.22.6	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana	BPBD	1 Kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		1 Kegiatan	130.000.000
1.5.2.1.22.8	Pemantauan Radio Internet Gempa Dan Tsunami	Terserapnya pengetahuan tentang menghadapi bencana	BPBD	12 Bulan	34.050.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		12 Bulan	39.050.000
1.5.2.1.22.10	Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat/Desa Tangguh Dan Pelatihan	Terserapnya pengetahuan tentang menghadapi bencana	BPBD	4 Kecamatan	76.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		4 Kecamatan	81.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.2.1.22.12	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Pegawai BPBD yang handal dalam penanggulangan bencana	BPBD	36 Orang	135.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		36 Orang	140.000.000
1.5.2.1.22.13	Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Terciptanya Masyarakat yang siap Tanggap Dalam Menghadapi Bencana	BPBD	2 Kali	75.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		2 Kali	80.000.000
1.5.2.1.22.14	Penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana	Kesiapsiagaan sekolah/madrasah terhadap bencana	BPBD	1 Sekolah	130.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		1 Sekolah	133.000.000
1.5.2.1.22.19	Pembentukan Satgas Penanganan Bencana BPBD	Terbentuknya satgas penanganan bencana	BPBD	12 Orang/Bulan	560.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		12 Orang/Bulan	570.000.000
1.5.2.1.24	Program Penanggulangan Bencana				328.000.000				390.000.000
1.5.2.1.24.1	Workshop Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna)	tersedianya data untuk pasca bencana	BPBD	2 Dokumen	95.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		2 Dokumen	100.000.000
1.5.2.1.24.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana	Terlaksananya Penanggulangan Bencana	BPBD	12 Orang/Bulan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		12 Orang/Bulan	150.000.000
1.5.2.1.24.4	Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Tersedianya data penilaian kerusakan dan kebutuhan akibat bencana	BPBD	7 Dokumen	73.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		7 Dokumen	75.000.000
1.5.2.1.24.5	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Tersedianya perbaikan rumah akibat bencana	BPBD	3 Unit	60.000.000	Dana Alokasi Umum (D A U);		3 Unit	65.000.000
	TOTAL				4.704.000.000				5.036.170.500